PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING

(Studi Empiris Pada Pemda Kota Magelang)

SKRIPSI

Disusun Oleh :
Desti Cahya Harini
NPM. 16.0102.0199

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING

(Studi Empiris Pada Pemda Kota Magelang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

Desti Cahya Harini

NIM. 16.0102.0199

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING

(Studi Empiris Pada Pemda Kota Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Desti Cahya Harini

NPM **16.0102.0199**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal **08 Februari 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Ketua

Wawan Sadtyo N., S.E, M.Si.,Ak.,CA.

Sekretaris

Veni Soraya Dewi, SE., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 19 FEB 2019

Dra. Marlina Kurnia, M.M

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangaan dibawah ini:

Nama	: Desti Cahya Harini
NIM	: 16.0102.0199
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING

(Studi Empiris Pada Pemda Kota Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademi yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang,
Peneliti

Desti Cahya Harini
NIM. 16.0102.0199

RIWAYAT HIDUP

Nama	**:**	Desti Cahya Harini
Jenis Kelamin	**:**	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	**:**	Magelang, 3 Desember 1994
Agama	**:**	Islam
Status	**:**	Belum Menikah
Alamat Rumah	**:**	Jl Rama No 4A Rt 09 Rw 06, Samban Kidul, Panjang, Kota Mgelang
Alamat Email	**:**	desticahya@gmail.com
Pendidikan Formal :		
Sekolah Dasar	**:**	SD Negeri 6 Magelang
SMP	**:**	SMP Negeri 2 Magelang
SMA	**:**	SMA Negeri 3 Magelang
Perguruan Tinggi	**:**	D3 Program Studi Akuntansi Universitas Gadjah Mada S1 Program Studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang
Pengalaman organisasi	**:**	Sekretaris Umum Keluarga Wirausaha Mahasiswa UGM

Magelang, 29 Januari 2019
Peneliti

Desti Cahya Harini
NIM. 16.0102.0199

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Asy Syarh : 6-9)

Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung
(QS. Ali Imran :173)

Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita
(Qs At-taubah : 40)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING** (Studi Empiris Pada Pemda Kota Magelang)**"** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajad Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenan itu penulis ingin menyampaikan rassa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Nur Laila Yuliani , SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak, Ibu dan Adek terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
5. Para pegawai pada OPD Kota Magelang atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan tulisan ini ataupun bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Magelang, 29 Januari 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi iii
Halaman Riwayat Hidup iv
Motto v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar x
Daftar Lampiran xii
Abstrak xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kontribusi Penelitian 11
E. Sistematika Pembahasan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka 14
   1. Teori Agency 14
   2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 16
   3. Teknologi Informasi 18
   4. Pengendalian Internal 21
   5. Laporan Keuangan 23
   6. Kualitas Laporan Keuangan 25
   7. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 27
B. Telaah Penelitian Sebelumnya 33
C. Perumusan Hipotesis Penelitian 35
D. Model Penelitian 49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel 50
B. Teknik Pengambilan Sampel 50
   1. Jenis dan Sumber Data 50
   2. Teknik Pengumpulan Data 51
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 52
D. Metode Analisis Data 55
   1. Statistik Deskriptif 55
   2. Model Pengukuran atau *outer model* 57
   3. Model Struktural atau *inner model* 57
   4. Pegujian Hipotesis 58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sampel Penelitian 59
B. Statistik Deskriptif Responden 59
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 60
D. Model Pengukuran atau *outer model* 62
E. Model Struktural atau *inner model* 67
F. Pegujian Hipotesis 72
G. Pembahasan 77

BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan 88
B. Keterbatasan 89
C. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Magelang 5
Tabel 2 Hasil Penelitian Terdahulu 33
Tabel 3 Definisi operasional dan pengukuran variabel 52
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian 59
Tabel 4.2 Profil Responden 60
Tabel 4.3 Deskriptif Statistik 61
Tabel 4.4 *Output covergent validity* 63
Tabel 4.5 *Output covergent validity* 64
Tabel 4.6 Nilai AVE 65
Tabel 4.7 Pengujian Reliabilitas 66
Tabel 4.8 *Goodness Of Fit* 67
Tabel 4.9 Hasil Uji *R-square* 67
Tabel 4.10 *Effect size for path coefficient* 68
Tabel 4.11 Estimas koefisien jalur 70
Tabel 4.12 *Indirect Effect* 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Penelitian 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 95
Lampiran 2 Tabulasi Data Pengisian Kuesioner 104
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif 116
Lampiran 4 Hasil Model pengukuran *(outer model*) 117
Lampiran 5 Hasil Model struktural *(inner model*) 120
Lampiran 6 Daftar OPD Kota Magelang 121
Lampiran 7 Tanda Terima Kuesioner 122

ABSTRAK

"PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING (Studi Empiris Pada Pemda Kota Magelang)"

Oleh:
Desti Cahya Harini

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan mengirim 100 kuesioner kepada pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau keuangan. Kuesioner kembali sebanyak 83 responden atau sebesar 83%. Data diolah menggunakan Smart-PLS 3.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 1) pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, 2) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, 3) kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, 3) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sedangka hasil intervening menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan tknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan melalui standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Salamun (2007) menyatakan bahwa tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya ialah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan tidak hanya meliputi komponen laporan keuangan, tetapi juga meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan.

Laporan keuangan yang ideal adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dan juga bisa dipertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif sebuah laporan keuangan yang harus diwujudkan dalam informasi

akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan yang dihasilkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No.24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PPNo.71 tahun 2010) karakteristik laporan keuangan antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jika informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah telah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good government governance),* yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP memberikan pedoman bagaimana laporan keuangan harus disajikan, mengatur transaksi dicatat atau diakui, kapan harus diakui, cara pengukurannya hingga cara pelaporannya. SAP yang terbaru yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual sesuai amanat PP No. 71 tahun 2010 merupakan perubahan dari SAP Basis Kas Menuju Akrual (SAP No. 24 tahun 2005). Standar baru ini harus sudah diterapkan oleh seluruh organisasi pemerintahan di Indonesia paling lambat untuk pelaporan keuangan tahun 2015. Dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual menjadi dasar mulai diberlakukannya SAP basis akrual di Kota Magelang.

Menurut Syarifudin (2014). Perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akrual bukan sekedar masalah teknis pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan, tetapi membutuhkan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), serta mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kemudian untuk menilai ketepatan pelaksanaan kebijakan organisasi dan melakukan tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan maka diperlukan peran pengawas agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Oleh karenanya, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki kompetensi, sistem informasi yang memadai dan pengendalian internal yang baik agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD yang berkualitas.

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan menarik untuk dilakukan dikarenakan masih banyaknya ketidakwajaran dalam penyusanan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perudang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp1,13 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain mengakibatkan kerugian permasalahan ketidakpatuhan juga mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 413 permasalahan senilai Rp419,60 miliar, 846 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp537,72 miliar, serta 2.331 permasalahan penyimpangan administrasi.

Ketidakwajaran terhadap penyusunan LKPD juga ditemui Kota Magelang pada LKPD tahun 2015. Beberapa hasil temuan BPK terhadap LKPD Kota Magelang yaitu; Aset tetap tanah tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp136, 96 miliar, Aset tetap peralatan dan mesin Dinas Pendidikan sebesar Rp80,866 miliar, Aset tetap gedung dan bangunan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp24,432 miliar, Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp19,982 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak dapat ditelusuri, Beban penyusutan dan akumulasi penyusutan atas aset gedung dan bangunan minimal sebesar Rp17,455 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya, dan Aset tetap tahunan anggaran belum dapat diyakini kewajarannya karena tindak lanjut belum seluruhnya dilaksanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan diperolehnya hasil pemeriksaan, 375 LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 139 LKPD mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, dan 23 LKPD mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (BPK, 2017). Kota Magelang sendiri memperoleh hasil audit laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2016. Hal ini merupakan pencapaian yang baik bagi Kota Magelang karena dapat mengulang keberhasilannya di tahun 2006 dengan hasil pemeriksaan BPK wajar tanpa pengecualaian . Berikut daftar tabel opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2016:

Tabel 1
Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Magelang

Tahun	Opini
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: semarang.bpk.go.id

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang dapat diteliti. Peningkatan kualitas pelaporan dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa sebuah pemerintah daerah sudah memberikan pelaporan keuangan daerah yang andal. Meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun ada beberapa catatan dari BPK yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Magelang. Berdasarkan surat dari BPK

Nomor: 152/S/XVIII.SMG/05/2017 tentang hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun 2016, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Lemahnya sistem pengendanlian yang menjadi catatan penting dari BPK adalah terkait pengelolaan aset Pemerintah Kota Magelang. Beberapa catatan penting yang diberikan BPK antara lain tentang Aset Tetap dicatat sebagai pembentuk nilai Aset Tetap sendiri, bukan digabung dengan aset induknya, kemudian Aset Tetap yang nominalnya tidak diketahui keberadaanya dan Aset Tetap yang belum di dukung bukti kepemilikan. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, antara lain pelaksanaan empat belas paket pekerjaan pada pemerintah Kota Magelang tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan kontrak.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali di peroleh Pemerintah Daerah Kota Magelang pada tahun anggaran 2017. Penyerahan LHP dilakukan oleh auditor utama BPK RI kepada Walikota Magelang pada tanggal 7 Juni 2017 bertempat di Gedung BPK RI perwakilan Jawa Tengah. Namun penyusunan LHP masih menuai beberapa catatan dari BPK, tidak jauh berbeda dengan hasil pemeriksaan LHP tahun 2016, Pemerintah Kota Magelang masih harus memperbaiki sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Penguatan sistem pengendalian di khususkan pada pengelolaan dan penatausahaan aset di Kota Magelang. Selanjutnya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan ditemukan pada pemberian

honorarium atas penunjukkan pengelolaan keuangan daerah dan pemberian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pimpinan DPRD yang tidak sesuai ketentuan. Catatan atas LHP tahun 2017 tersebut disampaikan oleh BPK melalui surat Nomor 160/S/XVIII.SMG.05/2018.

Penelitian Yoga (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. Penelitian Utama (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya dalam penelitian Nurlilah dan Muid (2014) tentang kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Nurlaila & Rahmawati (2014) tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pengendalian intern, teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan standar akuntansi pemerintah dan sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya yaitu dari

Nadir dan Hasyim (2017) menjelaskan mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dengan variabel intervening standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru, dan berpengaruh tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, selanjutnya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru, baik pengaruh secara lansung maupun tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nadir dan Hasyim (2017), dengan perbedaannya yaitu **pertama,** menambahan variabel pengendalian internal dengan alasan bahwa Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, disebutkan setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Sehingga Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya suatu organisasi,serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kesalahan dan penyalahgunaan penyusunan laporan keuangan.

Kedua, objek yang dipilih di OPD Kota Magelang karena hasil audit laporan keuangan pemerintah Kota Magelang diketahui mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013-2015 dan baru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016-2017 (www.bpkp.go.id/diy). Selain hal tersebut, adanya permasalahan dalam pengendalian aset daerah yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan data, kelemahan sistem pengendalian intern serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang menjadi alasan diperlukannya laporan keuangan yang berkualitas dengan harapan dapat diakses dengan mudah oleh publik dan mudah dipahami sehingga pengguna laporan keuangan khususnya masyarakat dapat percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual?

6. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual?
7. Apakah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
8. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai variabel intervening?
9. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai variabel intervening?
10. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai variabel intervening?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
4. Menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
5. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

6. Menguji pengaruh pengendalian internal terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
7. Menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.
8. Menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai variabel intervening.
9. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai variabel intervening.
10. Menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai variabel intervening.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah khususnya di Pemerintah Daerah Kota Magelang.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengelolaa keuangan daerah dalam memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

b. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan daerah

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan mengenai teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok – pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan yang menjelaskan seputar deskripsi data, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent)* untuk melakukan sesuatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan *(agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih *(principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Eisenhardt (1989), menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya piker terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan

bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

a) *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
b) *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
c) *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karenaadanya hubungan agensi.

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agensi/ Pemerintah) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*/ Masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam,yaitu : 1) pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertical), dan 2) pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *selfinterest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk

memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunis dan cenderung tidak menyukai risiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Sehingga tujuan pemerintah dalam mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas baik di lembaga pusat khusunya daerah akan dapat terwujud.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Spencer dan Spencer (1993) menunjukan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang terdiri dari *knowledge, skill, attitude* yang ada hubungan sebab akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektifitas kerja. Menurut Sugeng dan Imam (2000) sumber daya manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi.

Menurut Simamora (2014), kompetensi karyawan sulit ditentukan dengan ukuran yang obyektif, perusahaan tergantung pada pendidikan sebagai indikator. Pendidikan mungkin relevan, tetapi hanya mewakili

keahlian, pengetahuan atau kemampaun tertentu yang ditunjukkan berkaitan dengan keluaran atau perilaku pada pekerjaan. Pendidikan hanya merupakan pengganti yang lebih subyektif dari aspek pengalaman dan keahlian aktual, kemampuan dan pengetahuan. Menurut Simanjuntak (2010), kompetensi karyawan adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu (1) kemampuan dan ketrampilan kerja, (2) motivasi dan etos kerja.

Kemampuan kerja pada dasarnya merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pola kerja yang efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bahwa dengan kemampuan kerja yang tinggi, maka hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan akan dapat dieleminir, baik secara kelompok maupun individu. Kemampuan kerja yang rendah, secara empiris, karyawan akan banyak menemui hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Program pendidikan dan pelatihan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan kerja merupakan alternatif yang potensial karena meningkatkan kinerja karyawan.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 46 A Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatanya.

a) Pengetahuan (*knowledge*) yaitu faktadan angka dibalik aspek-aspek teknis
b) Keahlian/keterampilan (*Skills*), yaitu kemampuan untuk menunjukan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus, dengankegiatan yang paling sedikit.
c) Sikap (*attitude*), yaitu yang ditunjukankepada atasan atau orang lain bahwa yang bersangkutan mampu beradadalam lingkungan kerjanya.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa dengan adanya motif untuk mengerahkan perilaku terhadap tujuan tertentu yang dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, maka tujuan akan dapat terwujud. Simamora (2014), mengemukakan bahwa skill atau keterampilan maupun pengetahuan, merupakan unsur kompetensi yang mampu mendorong efektifitas dan efisiensi kerja. Pelaksanaan pekerjaan yang dilandasi dengan kemauan, kemampuan dan pengetahuan, tentunya akan memperoleh hasil yang optimal bagi perusahaan. Oleh karena itu pengembangan kompetensi sangat penting bagi setiap perusahaan.

3. Teknologi Informasi.

Menurut Warsita (2008) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware*, *software*, *useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Prasojo dan Rianto (2011) teknologi

informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembanganya sangat pesat. Hamzah dan Lamatenggo (2011) juga mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Menurut McKeown dalam Suyanto (2005) teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teori yang lain juga diungkapkan oleh Williams dalam Suyanto (2005) teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Teori pendukung yang lain menurut Behan dan Holme dalam Munir (2009) teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk me-*record*, menyimpan, memproses, mendapat lagi, memancar/mengantarkan dan menerima informasi

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (*hardware*, *software*, *useware*) yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Menurut

Abdulhak (2005) terdapat klasifikasi pemanfaatan ICT ke dalam tiga jenis, yaitu : pertama, ICT sebagai media (alat bantu) pendidikan yaitu hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan. Kedua, ICT sebagai sumber yakni sebagai sumber informasi dan mencari informasi. Ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran. Menurut Warsita (2008), secara umum ada tiga pemanfaatan teknologi informasi atau instruksional komputer dan internet untuk pendidikan dan pembelajaran, adalah : Pertama, *Learning about computers and the internet*, yaitu Komputer dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran, misalnya ilmu computer (*computer science*). Kedua, *Learning with computers and the internet*, yaitu teknologi informasi memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Heinich dalam Warsita (2008), TI merupakan segala bentuk penggunaan atau pemanfaatan komputer dan internet untuk pembelajaran. Bentuk penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi yakni :1) Tutorial, merupakan progam yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, yakni suatu konsep yang disajikan dengan teks, gambar baik diam Praktik dan dan latihan (*drill and practice*) untuk melatih peserta didik sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaa suatu konsep. Demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat TI adalah sebagai berikut :pertama, TI sebagai sumber yakni TI dapat dimanfaatkan untuk sumber informasi dan untuk mencari informasi yang

akan dibutuhkan. Kedua, TI sebagai media, sebagai alat bantu yang memfasilitasi penyampaian suatu informasi agar dapat diterima dan dimengerti dengan mudah. Ketiga, TI sebagai pengembang keterampilan pembelajaran, pengembangan keterampilan-keterampilan berbasis teknologi informasi dengan aplikasi-aplikasi dalam kurikulum.

4. Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif. Unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi :

a) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian.

b) Penilaian Risiko

Menurut Bastian (2011) untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan.Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

c) Kegiatan Pengendalian

Menurut Bastian (2011), aktivitas pengendalian adalah **k**ebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen.kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif

d) Informasi dan Komunikasi

Menurut Bastian (2011) Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah kebijakan dan prosedur atas transaksi yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan.

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yaitu informasi yang berhubungan dengan peristiwa peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e) Pemantauan

Menurut Bastian (2011), Proses penilaian kualitas kinerja diukur dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu dan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanakan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *review*, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya yang ditetapkan.

5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban kepengelolaan atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh

suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informai mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokai sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Adapun Tujuan penyusunan laporan keuangan pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 paragraph 23 disebutkan bahwa, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:

a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f) Menyediakan informasi mengenaiperubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

6. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggung jawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Adapun laporan keuangan dapat dikatakan sudah berkualitas jika bisa memenuhi beberapa syarat karakteristik kualitas sesuai PP No.71 Tahun 2010, yaitu:

a) Relevan

Laporan keuangan biasanya dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

b) Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi–informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara, jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila

entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

7. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh *International Federation of accounting Public Sector Committee* (2002) dalam modul Kementrian Keuangan 2014, menyatakan bahwa pelaporan keuangan berbasis akrual bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sehubungan dengan biaya jasa pelayanan, efisiensi dan pencapaian sasara. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan organisasi pemerintah dan pergerakannya. Akuntansi yang berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik sumber daya tersebut. Dengan paradigma mengunakan basis akrual maka dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistim keuangan entitas publik, pengendalian

fiskal, manajemen aset yang handal dan akuntabel, pengungkapan informasi yang lebih lengkap, sehingga membantu pengguna dalam pengembilan keputusan serta peningkatan akuntabilitas pengangaran, pelaksanaan dan pertanggunjawaban. Konsep akrual basis didasarkan pada dua pilar yaitu:

a. Pengakuan pendapatan :

   Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, kapan kas / setara kas benar-benar diterima bukan yang utama. Oleh karena itu, dalam basis akrual akan muncul estimasi piutang tak tertagih, karena penghasilan sudah diakui meskipun kas belum diterima.

b. Pengakuan beban:

   Beban diakui pada saat kewajiban membayar telah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka momen ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar. Lebih rinci transaksi akrual pendapatan dan belanja diatas sebagai berikut:

   1) pendapatan yang masih harus diterima; merupakan pendapatan yang sampai dengan periode pelaporan belum diterima oleh karena adanya tunggakan pungutan (pajak, retribusi) maupun pendapatan serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan

kemasyarakatan . akan disajikan sebagai piutang.

2) pendapatan diterima dimuka; merupakan pendapatan yang diterima dan sudah disetor ke rekening kas umum negara/daerah, namun wajib setor (penerima manfaat) belum menikmati barang/jasa/fasilitas pemerintah (pemberi manfaat). Bisa juga dalam bentuk pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak ke rekening kas umum negara/daerah yang sesuai hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih setor atas pajak/bukan pajak. disajikan sebagai kewajiaban jangka pendek.
3) belanja yang masih harus dibayar; yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen yang dilakukan oleh organisasi pemerintah (penerima manfaat), namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/ realisasi atas hak/ perjanjian/ komitmen tersebut terhadap pemberi manfaat. Disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.
4) belanja dibayar dimuka; merupakan pengeluaran yang telah dibayarkan dari rekening kas umum negara/daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/ fasilitas dari pihak ketiga belum diterima organisasi pemerintah. Pada neraca disajikan sebagai piutang.

Kerangka Konseptual Lampiran I PP No.71 Tahun 2010, laporan keuangan yang disusun oleh entitas untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan beserta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas tersebut selama satu periode pelaporan. Unsur komonen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari Laporan untuk Pelaksanaan Anggaran, meliputi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL, b. Laporan Finansial, meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Dengan menyusun laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan financial lengkap dengan komponenya maka entitas pemerintah tersebut telah menerapakan basis akuntansi akrual dimana prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan saat pengaruh atas transaksi maupun kejadian harus diakui dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan akrual mengakui pendapatan pada saat hak telah diperoleh (*earned*) atau berpindah kepemilikan dan beban (belanja) diakui ketika kewajiban timbul atau sumber daya digunakan. Pengakuan aset dilakukan pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal, dan kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau pada saat kewajiban (utang) timbul. Pendapatan didasarkan pencatatan basis kas yaitu semua penerimaan dalam bentuk tunai atau kas yang dicatat organisasi pemerintah. Jumlah pendapatan yang dilaporkan adalah sama dengan total uang yang diterima

kas perusahaan suatu periode. LKPD disusun bertujuan menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan sumber daya yang digunakan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan hendaknya dapat memberikan penyajian yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada pengguna *(stakeholders)*, serta dalam lingkup manajemen pemda dapat memudahkan fungsi yang dibangun dalam perencanaan, pengelolaan dan pertangungjawaban serta pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

Basis akuntansi yang terapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Akrual basis untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan pengurangan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari (RKUD) atau entitas pelaporan. Demikan mengenai pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Lebih lanjut PP. No 71 tentang kerangka konseptual paragraf 64 menjelaskan bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan atas dasar basis kas *(cash basis)*, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun atas dasar basis kas, menunjukkan bahwa pendapatan dan penerimaan

pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah. Demikian halnya , bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual *(accrual basis)*, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca menunjukkan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, dengan kata lain pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Perubahan dari *cash basis* menjadi *accrual basis* memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologis masyarakat negara tersebut (Mardiasmo, 2009). Nazier (2009) menyatakan perubahan fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari *cash basis* menjadi *accrual basis* perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. Dalam perubahan sistem pelaporan mensyaratkan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandat dari peraturan, komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, SDM yang memadai, kemampuan teknologi dan sistem informasi yang memadai, dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislatif.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Nurlilah dan Muid (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Syarifudin (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Peran Audit Intern dan sistem pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)	Kompetensi SDM, Peran Auditor Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas kualitas laporan keuangan. Namun demikian pengendalian internal tidak dapat memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, peran audit intern dan pemanfatatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2 (Lanjutan)
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Yuliani & Agustin (2014)	Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangakan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
Nadir dan Hasyim (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris di Pemda Kabupaten Barru)	Pemanfaatan teknologi informasi seara langsung berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan namun penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel kompatensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung
Armel (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Tabel 2 (Lanjutan)
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Utama (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang terdiri dari *knowledge*, *skill*, *attitude* yang ada hubungan sebab akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektifitas kerja. Pengertian ini memberikan makna bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai, maka laporan keuangan akan tersusun sebagai dengan ketentuan yang berlaku karena pegawai mempunyai perilaku yang baik untuk mematuhi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam teori agensi sumber daya manusia memiliki keahlian dalam melaksanaan sistem akuntansi yang apat menimbulkan hambatan jika pemahaman penerapan ilmu akuntansinya rendah. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan terpenuhinya kualitas

sebuah laporan keuangan (*agent*) sehingga dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan oleh pihak *principal*. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang baik, akan meningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dihasilkan sehingga dapat diandalkan.

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Syarifudin (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Warsita (2008) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware*, *software*, *useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Pengertian ini memberikan makna bahwa penerapan sistem komputerisasi akuntansi akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan, karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan keuangan.

Berdasarkan teori *agency*, teknologi informasi membantu pegawai (*agent*) dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat sebagai *principal*. Teknologi informasi yang lebih maju lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan dapat memberikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan memenuhi kriteria kualifikasi.

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Syarifudin (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Nurlilah (2014) Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pengendalian Internal dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian ini memberikan makna bahwa dengan adanya pengendalian internal yang baik, maka pelaporan keuangan yang menyimpang akan dapat dinimalkan sehingga kualitas laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan. Kurangnya arahan terhadap sumber daya manusia terhadap tujuan yang ditentukan pemerintahan dapat menimbulkan konflik diantara suatu organisasi pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dapat memberikan arahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah (*agent)* sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan *(principal)*. Hal ini menunjukkan semakin baik pengendalian intern akuntansi maka semakin baik juga pemerintah dalam memberikan laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Yuliani & Agustin (2016), Armel (2017), Utama (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Menurut Sugeng dan Imam (2000) sumber daya manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Standar akuntansi berbasis akrual merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah dalam penyusunan laporan.

Pengertian ini memberikan makna bahwa sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan hal yang wajb diimplementasikan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dalam mengimplementasikan standar akuntansi berbasis akrual. Kemampuan karyawan yang memadai, tentunya laporan keuangan akan dapat disusun sebagai dengan ketentuan yang berlaku sehingga laporan keuangan mempunyai kualitas yang baik.

Perilaku pegawai yang diwujudkan pada pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan merupakan implementasi dari teori agensi, dimana perilaku tersebut sebagai cara seseorang untuk menghindari resiko (*risk averse*).

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Syarifudin (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H4. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

5. Pengaruh pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Menurut Warsita (2008) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware*, *software*, *useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Pengertian ini memberikan makna bahwa penerapan sistem komputerisasi akuntansi akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan, karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan keuangan.

Berdasarkan teori *agency* dijelaskan tentang hubungan keagenan mengenai suatu kontrak dimana satu atau lebih (*principal)* memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan sesutu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal*, maka diperlukan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan.

Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Persiapan di bidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap standar akuntansi pemerintah.. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

6. Pengaruh pengendalian internal terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Menurut Romney and Steinbart (2015) pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada.

Masih ditemukannya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah,

menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini "tidak wajar dan/atau *disclaimer*" diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. Berdasarkan teori agensi, sistem pengendalian intern akuntansi yaitu *principal* memberikan arahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah (*agent)* sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H6. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

7. Pengaruh Standar Akuntansi Berbasis Akrual terhadap kualitas laporan keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajik an laporan keuangan pemerintah. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan

keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat

Teori keagenan menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban penyajian yang berkualitas harus didukung dengan pemahaman akuntansi yang baik bagi setiap staf dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus memahami bagaimana proses dan pelakasanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H7. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

8. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai variabel intervening

Spencer dan Spencer (1993) memgemukakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang terdiri dari *knowledge*, *skill*, *attitude* yang ada hubungan sebab akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektifitas kerja. Pengertian ini memberikan makna bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai, maka laporan keuangan akan tersusun sebagai dengan ketentuan yang berlaku karena pegawai mempunyai perilaku yang baik untuk mematuhi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan.

Nazier (2009) menyatakan perubahan fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari *cash basis* menjadi *accrual basis* perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. Dalam perubahan sistem pelaporan mensyaratkan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandat dari peraturan, komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, SDM yang memadai, kemampuan teknologi dan sistem informasi yang memadai, dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislatif.

Sumber daya manusia sebagai individu yang menjalan proses penyusunan laporan keuangan (agent) merupakan salah satu faktor yang menentukan terpenuhinya kualitas sebuah laporan keuangan sehingga dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan oleh pihak *principal*.

Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pemahaman dalam melaksanaan sistem akuntansi dan menerapkan standar akuntansi berbasis akrual merupakan implementasi dari teori agensi, dimana hal tersebut sebagai cara seseorang untuk menghindari resiko (*risk averse*).

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui standar akuntansi pemerntah berbasis akrual. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H8. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

9. Pengaruh pemanfaatan teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai variabel intervening

Menurut Warsita (2008:135) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware*, *software*, *useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Pengertian

ini memberikan makna bahwa penerapan sistem komputerisasi akuntansi akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan, karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan.

Teknologi informasi membantu pegawai (*agent*) dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat sebagai *principal*. Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi khususnya terkait sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistim keuangan entitas publik, pengendalian fiskal, manajemen aset yang handal dan akuntabel serta pengungkapan informasi yang lebih lengkap sehingga laporan keuangan dapat memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui standar akuntansi pemerntah berbasis akrual.. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H9. Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

10. Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai variabel intervening

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengertian ini memberikan makna bahwa dengan adanya pengendalian internal yang baik, maka pelaporan keuangan yang menyimpang akan dapat dinimalkan sehingga kualitas laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengertian ini memberikan makna bahwa dengan adanya pengendalian internal yang baik, maka pelaporan keuangan yang menyimpang akan dapat diminimalkan sehingga kualitas laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi, masih ditemukannya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam hal ini terkait standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dapat memberikan arahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah (*agent)* sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan *(principal)*

Hal ini didasarkan pada penelitian Nurlilah dan Muid (2014), Yuliani & Agustin (2016), Nadir dan Hasyim (2017), Armel (2017), Utama (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui standar akuntansi pemerntah berbasis akrual.. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H_{10}. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

D. Model Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

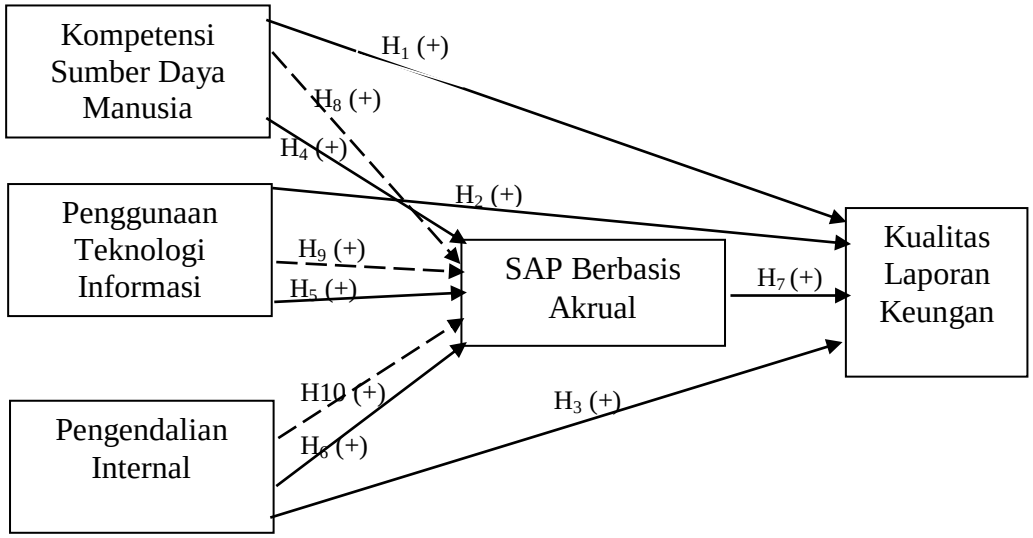

Gambar 1.
Model Penelitian

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada OPD pemerintah daerah (Pemda) di Kota Magelang. Pemilihan sempel didasarkan pada metode pengambilan sempel tidak acak atau nonrandom sampling yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sempel yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sempel ini adalah pejabat pada OPD pemerintah daerah Kota Magelang. Dari kriteria pejabat pada setiap OPD akan diambil 3 responden yaitu Bendahara, Kasubag Keuangan dan, Staf Bagian Keuangan.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama atau sumber penelitian secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam

alternatif yang didefinisikan secara jelas (Sekaran, 2011). Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jawaban atau pertanyaan responden tentang kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, kualitas laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket yang berisi kuesioner yang diberikan langsung kepada para responden dan kemudian responden akan mengisinya sesuai dengan pendapat dan persepsi responden. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3
Definisi operasional dan pengukuran variable

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Dependen:		
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Daerah dalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. (SAP,2010)	Instrumen dengan jumlah 8 butir pernyataan diambil dari Nurlilah dan Muid (2014) dengan indikator sebagai berikut : a. Aktivitas keuangan di masa lalu b. Memprediksi masa yang akan datang c. Ketepatwaktuan penyajian d. Pengambilan keputusan e. Disajikan wajar dan jujur f. Informasi dapat dibandingkan g. Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami h. Sesuai SAP Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.

Tabel 3 (Lanjutan)
Definisi operasional dan pengukuran variable

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen:		
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Badan Kepegawaian Negara ,2003).	Instrumen dengan jumlah 6 butir pernyataan diambil dari Nurlilah dan Muid (2014) dengan indikator sebagai berikut : a. Pemahaman tentang akuntansi b. Sumber daya yang memadai c. Peran dan tanggung jawab d. Pelatihan keahlian dalam tugas e. Sosialisasi peraturan baru f. Pemahaman tentang struktur organisasi Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 point, yaitu skala 1= Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Teknologi Informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan tenologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi (Wilkinson, 2005).	Instrumen dengan jumlah 5 butir pernyataan diambil dari Nurlilah dan Muid (2014) dengan indikator sebagai berikut : a. Sistem akuntansi sesuai SAP b. Jaringan internet termanfaatkan dengan baik c. Aplikasi yang digunakan d. Laporan keuangan terkomputerisasi e. Software susuai dengan UU Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.

Tabel 3 (Lanjutan)
Definisi operasional dan pengukuran variable

Variabel	Definisi	Pengukuran
Pengendalian Intern	Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efesiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Pratolo dkk, 2016).	Instrumen dengan jumlah 5 butir pernyataan diambil dari Nurlilah (2014) dengan indikator sebagai berikut : a. *Standard Operating Procedure* (SOP) b. Implementasi PP No 60 c. Dokumen dan catatan yang memadai d. Pemisahan wewenang e. Tindakan disiplin atas pelanggaran. Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.
Standar Akuntansi Pemerintah	SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (SAP,2010)	Instrumen dengan jumlah 4 butir pernyataan diambil dari Armel (2017) dengan indikator sebagai berikut : a. Akuntabilitas b. Manajemen c. Transparasi d. Keseimbangan Antar Generasi Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi demografi responden penelitian serta deskripsi mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari *mean*, deviasi standar, minimum dan maksimum (Ghozali, 2016)

2. Model Pengukuran atau *Outer Model*

Model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikator atau dapat dikatakan bahwa *outer model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada *outer model* :

1) Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrument yang digunakan dan menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument serta beberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (Hair *et al*, 2010). Uji validitas dalam outer model terdiri dari uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. *Covergent validity* (validitas konvergen) bahwa nilai *convergen validity* merupakan nilai *loading* factor pada variable laten dengan indicator-indikatornya. Nilai

loading indicator yang dihasilkan antara 0,40-0,70 masih dapat dipertahankan (Sholihin dan Ratmono, 2013). Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan loading factor 0,50. *Discriminant Validity* (validitas diskriminan) merupakan nilai *cross loading* factor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai *loading* dengan konstruk yang lain. Uji validitas juga dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Akar kuadrat AVE harus lebih besar daripada korelasi antar konstruk dan lebih dari 0,50 (Sholihin dan Ratmono, 2013)

2) Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran tersebut mempunyai akurasi dan ketepatan pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu. Realibilitas instrument ditentukan dari nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha.* Menurut Chin dalam Ghozali (2006), suatu indicator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70 untuk semua konstruk.

3) *Goodness of fit* atau model *fit indices and p values*

Indikator fit model digunakan untuk membandingkan model terbaik antar berbagai model yang berbeda dan untuk mengetahui *goodness of fit* dari data yang dipakai. Indikator fit yang dihasilkan yaitu *average R-squared* (ARS), *average path coefficient* (APC), dan average *variance inflation factor* (AVIF). Kriteria dari *goodness of fit* yaitu nilai

p dari ARS dan APC harus signifikan yaitu kurang dari 0,05 dan nilai AVIF harus lebih kecil dari 5.

3. Model Struktural atau *Inner model*

Inner model (*inner relation, structural model, substantive theory*) menggambarkan hubungan antara variable laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural di evaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-GeisserQ-Square test* untuk *predictive relevance* dan ukuran efek (*f-squared effect size*). Ada beberapa uji untuk model structural yaitu :

1) *R-squared*

Nilai koefiesien determinasi (*R-squared*) 0,75; 0,50; 0,25 untuk setiap variable laten endogen dalam model struktural dapat diinterpretasikan sebagai subtansial, moderat, dan lemah.

2) Ukuran efek (*effect size*)

Effect size dihitung sebagai nilai absolut kontribusi individual setiap variabel laten prediktor pada nilai *R-Squared* variabel kriterion. Solihin dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa *effect size* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu lemah (0,02), medium (0,15) dan besar (0,35).

3) Estimasi Koefisien Jalur

Estimasi koefisien jalur merupakan nilai besarnya hubungan atau pengaruh konstruk laten. Estimasi ini dapat diperoleh melalui prosedur *Bootstrapping*.

4. Perumusan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis data pendekatan *Patrial Least Square* atau *variance-based Structural Equation Modeling* (SEM-PLS) yang dijalankan dengan software Wrap PLS 3.0. Adapun tujuan dari SEM-PLS adalah memaksimalkan nilai *R-Squared* dan meminimalkan residual atau kesalahan (*error*) prediksi (Sholihin dan Ratmono, 2013). Tujuan lain dari SEM-PLS adalah mengevaluasi kualitas data berdasarkan model pengukuran. Oleh karena itu, SEM-PLS dikatakan sebagai gabungan regresi dan analisis faktor.

Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah dan hubungan antara variabel independeen dengan variabel dependennya. Pengujian ini dilakukan dengan cara menganalisis estimasi koefisien jalur. Selain itu, pengujian hipotesis dapat dilakukan dari diagram jalur atas model yang sudah dibuat, sehingga lebih mudah karena sudah diketahui nilai koefisien masing-masing variabel dengan nilai signifikansinya. Hasil diagram jalur akan menunjukkan nilai koefisien dan nilai p yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Batas signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Hipotesis alternative akan diterima jika p value <0,05, jika p value >0,05 maka hipotesis alternatif tidak diterima.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai variabel intervening di Pemerintah Daerah Kota Magelang. Sampel yang diambil dan dapat diolah dalam penelitian ini berjumlah 83 pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yaitu kepala bagian dan staff bagian keuangan atau akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian dan hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
6. Pengendalian interna berpengaruh positif terhadap standar akuntansi pemerintah.

7. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaru negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
9. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
10. Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

B. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, sehingga memiliki keterbatasan tidak dapat dipastikan kuesioner yang dikirim benar-benar di isi oleh objek penelitian yang dimaksud.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai variabel intervening.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penyebaran kuesioner dapat disertai dengan metode wawancara agar responden dapat lebih memahami pernyataan kuesioner sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat.
2. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menguji pengaruh variabel lain terhadap kualitas laporan keuangan Kota Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

Armel, Raja Yoga Gustika. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *Jom Fekon*, Vol.4 No.1

Badan Pemerik Keuangan. 2017. Surat Pemberitahuan Nomor 152/S/XVIII.SMG/05/2017 Perihal Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun 2016

Badan Pemerik Keuangan. 2018. Surat Pemberitahuan Nomor 160/S/XVIII.SMG.05/2018 Perihal Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun 2017

Bastian, Indra. 2011. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empa

Binsar H. Simanjuntak. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Sektor Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Kongres Xi Ikatan Akuntansi Indonesia.

Biro Keuangan Bagian Anggaran. 2014. *Modul Bimtek Akuntansi Akrual*. Jakarta.

BPK. (n.d.-a). LHP LKPD. Retrieved from semarang.bpk.go.id

BPK, S. P. (n.d.-b). BPK menemukan 2.537 masalah berdampak Financial senilai Rp 9,87 triliun. Retrieved from www.bpk.go.id

Eisenhardt, K.M. 1989. *Agency Theory: An Assessment and Review*. Academy of Management Review, Vol. 14 (1). Pp. 57–74.

Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk.

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (B. P. U. Diponegoro, Ed.). Semarang

Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. 2011. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran.* Jakarta: PT Bumi Aksaracet

Jensen, & Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Conomic*, *3*(305–360)

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Public. Yogyakarta ; ANDI

Munir. 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta

Nadir, Rasyidah dan Hasyim. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *Jurnal Akuntansi Politeknik Ujung Pandang*. AKUNTABEL ISSN Print: 0216-7743 ISSN Online: 2528-1135.

Nurillah, As Syifa Dan Dul Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok).*Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 3 No.2. Issn (Online): 2337-3806.

Prasojo Diat Lantip, Riyanto. 2011. *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta :Gava Media

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara; Jakarta

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara; Jakarta

Rebuplik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sekretariat Negara; Jakarta

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara; Jakarta

Romney, Marshall B., dan Paul John Steinbart. 2015. *Accounting Information Systems, 13th ed*. England: Pearson Educational Limited.

Salamun, Suyono. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Availabel online at www.google.co.id

Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Simamora, Henry. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sugeng, ND. Imam. 2002. Mengukur dan Mengelola Intellectual capital. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI) Fakulatas Ekonomi UGM, Vol. 15 No. 2.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kulaitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Susilo, W. 2002. *Audit Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gema Armini

Suyanto. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*. Yogyakarta: ANDI

Spencer, Peter M., & Signe M.Spencer. 1993. *Competence at Work Models for Superior Performance*. New York: JhonWiley & Sons Inc.

Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No. 02, Bulan Desember 2014. Kebumen.

Ujiyantho dan Pramuka, 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur)Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar

Uma Sekaran, 2006. *Research Methods For Business*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Utama, Reno Julia. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indrigiri Hulu). *Jom FEKON*. Vol. 4 No. 1, hal 1429-1443.

Warsita, Bambang. 2008. *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*. Jakarta: Rineka

Wilkinson,Joseph W.,et.al. 2000. *Accounting Information system. Fourth Edition*. New York: Johnwiley & Sons.

Yuliani, Nur L dkk. 2016. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 14 No. 1, April. Universitas Muhammadiyah Magelang.